

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH INDUSTRI, DAN INFLASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KOTA/KABUPATEN JAWA BARAT

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

Alvina Aziziah*, Marlina Ekawaty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: This research focuses on the impact of minimum wages, number of industries, and inflation to job vacancy in the City/Regency of West Java 2017-2021. This study is important to research because job opportunities in West Java are still relatively low as evidenced by the high number of unemployment and job seekers. Whereas, West Java is known as central industry area which should be able to absorb labor and open up job opportunities in West Java. The purpose of this study is to find and analyze the influence of the minimum wage, the number of small and medium industries, the number of large industries and inflation to job opportunities. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis. The results of the study show the minimum wage, the number of small and medium industries, and the number of large industries partially have a positive and significant effect on job opportunities. Meanwhile, Inflation has no effect on job opportunity. Then simultaneously the minimum wage, the number of small and medium industries, the number of large industries, and inflation have a significant effect on job opportunity.

Keywords: Job Vacancy, Employment, Minimum Wage, Number of Industries, Inflation

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai dampak upah minimum, jumlah industri, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Kota/Kabupaten Jawa Barat tahun 2017–2021. Studi ini penting untuk diteliti karena kesempatan kerja di Jawa Barat masih tergolong rendah dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan tingginya pencari kerja yang ada di Jawa Barat. Sedangkan di sisi lain, Jawa Barat terkenal dengan kawasan sentra industri yang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja di Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum, jumlah industri kecil menengah, jumlah industri besar dan inflasi terhadap kesempatan kerja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial upah minimum, jumlah industri kecil menengah, dan jumlah industri besar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Kemudian secara simultan upah minimum, jumlah industri kecil menengah, jumlah industri besar, dan inflasi berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja, Upah Minimum, Jumlah Industri, Inflasi

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Alvina Aziziah

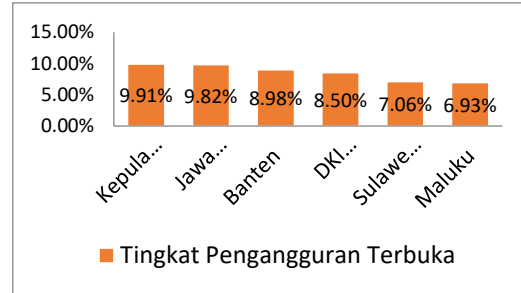
Email:

alvinaaziziah02@student.
ub.ac.idFakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia**Cite this as:**Aziziah, A. & Ekawaty, M. 2023. Analisis Pengaruh Upa Minimum, Jumlah Industri, dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Kota/Kabupaten Jawa Barat. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 896-909. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.15>

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan telah menjadi isu penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tidak jauh dari permasalahan mengenai kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan kebutuhan pokok manusia yang hampir sama dengan sandang, pangan, dan papan serta merupakan suatu indikator ekonomi yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Semakin besar jumlah penduduk berdampak pada jumlah angkatan kerja yang semakin besar. Tingginya jumlah angkatan kerja berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari kerja atau pengangguran. Untuk mencapai kondisi yang seimbang maka sudah seharusnya seluruh tenaga kerja dapat tertampung ke dalam pekerjaan yang cocok dengan keterampilan mereka. Hal ini berarti perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru (Adisetiawan, 2018).

Jawa barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2021), Jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 48.782.402 jiwa. Jika dilihat berdasarkan usia, 68,9% penduduk di Jawa Barat berada di usia produktif yaitu rentang usia (15–64 tahun) sebanyak 34.145.794 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Pada tahun 2021, Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat termasuk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 24.743.628 tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja yang tinggi di Jawa Barat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah penganggurannya. Jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 2.430.147 tenaga kerja. Selain itu, jika dilihat berdasarkan tingkat pengangguran terbukanya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terbesar kedua di Indonesia.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021). Data diolah

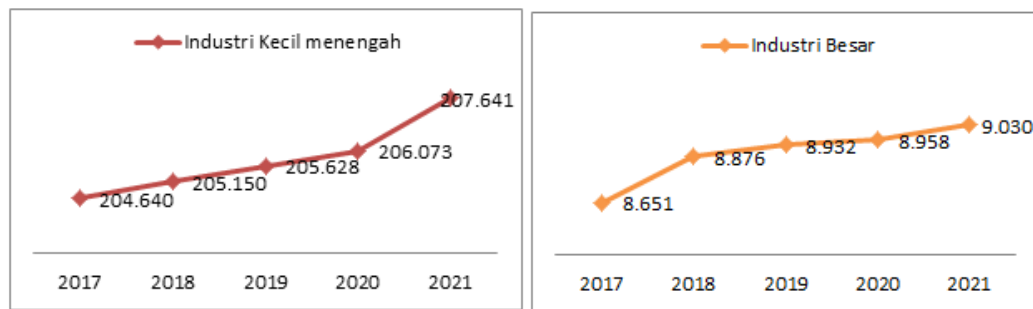
Dapat dilihat pada Gambar 1, Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terbesar di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 9,82%. Kemudian diikuti oleh Banten sebesar 8,98%, dan DKI Jakarta sebesar 8,50%. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa barat menjadi bukti jika kesempatan kerja di Jawa Barat masih sangat rendah.

Tabel 1. Provinsi dengan Kawasan Industri Terbesar di Indonesia

Provinsi	Jumlah Kawasan Industri	Luas
Jawa Barat	47	20.839,71 Ha
Kepulauan Riau	15	1.169,64 Ha
Banten	15	5.895,15 Ha
Jawa Timur	11	4.166,95 Ha
Jawa Tengah	8	5.037,99 Ha
Kalimantan Selatan	5	1.730,33 Ha
Sulawesi Tengah	6	7.198,1 Ha
Kalimantan Timur	3	1.290,89 Ha
Sumatera Utara	3	3.036,8 Ha
DKI Jakarta	2	1.019 Ha

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2021). Data diolah

Namun di sisi lain, Jawa Barat memiliki potensi sebagai daerah yang menghasilkan kesempatan kerja yang tinggi bagi tenaga kerja. Hal ini dikarenakan Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kawasan industri yang sangat besar dan seringkali dijuluki sebagai jantung industri di Indonesia. Jawa Barat memiliki 47 kawasan industri dengan luas 20.839,71 Ha.



Gambar 2. jumlah Industri Kecil Menengah dan Jumlah Industri Besar di Jawa Barat 2017-2021

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (2021)

Jika dilihat dari pertumbuhan industri-nya, baik industri kecil menengah maupun industri besar di Jawa barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Rakhmawati & Boedirochminarni (2018), industri merupakan salah satu pendorong dalam menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak industri atau jumlah usaha maka menjadikan semakin banyak pula pilihan dan peluang kerja sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh industri terhadap kesempatan kerja. Penelitian dari Wahyunia, F.E., Riyantob, W. H., & Sulistyono (2021) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan jumlah industri terhadap kesempatan kerja di provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020 menemukan jika jumlah industri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur. Namun, terdapat penelitian dari Puspita & Sudibia (2018) yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dalam sektor industri di Provinsi Banten menemukan jika jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja dalam sektor industri di Banten.

Selain industri, upah minimum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan diatas tingkat ekuilibrium maka kesempatan kerja akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan upah minimum yang tinggi akan membuat penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang diminta. Sehingga pengangguran akan naik dan membuat kesempatan kerja semakin

menurun (Mankiw, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian dari Kawaguchi & Mori (2021), yang melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan revisi UU upah minimum tahun 2007 terhadap lapangan kerja di Jepang. Menemukan hasil jika kenaikan upah minimum yang disebabkan oleh adanya kebijakan revisi upah minimum di Jepang tahun 2007 memberikan dampak terhadap menurunnya lapangan pekerjaan wanita dan pria dengan usia prima (produktif) di Jepang. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Fauzani (2019) yang membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi menemukan jika upah minimum memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi.

Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum dan mengalami kenaikan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi dapat memberikan dampak secara positif dan negatif terhadap kesempatan kerja. Menurut Sukirno dalam (Hutagalung, P. S., & Santosa, P. B.Santosa, 2013), bahwa dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada kenaikan bunga (pinjaman). Kenaikan bunga akan membuat investor mengalami penurunan sehingga kesempatan kerja berkurang. Hal ini selaras dengan penelitian dari Dwi & Djohan (2015) yang membahas mengenai pengaruh investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menemukan jika kenaikan inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan kesempatan kerja di Kota Samarinda.

Sedangkan berdasarkan teori kurva Phillip, hubungan antara inflasi dan pengangguran adalah negatif. Dimana semakin rendah tingkat inflasi akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran menunjukkan jika kesempatan kerja masih rendah. Hal ini selaras dengan penelitian dari Puspita & Sudibia (2018) yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dalam sektor industri di Provinsi Banten menemukan jika tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja dalam sektor industri di Banten. Semakin rendah tingkat inflasi maka kesempatan kerja juga ikut menurun.

KAJIAN PUSTAKA

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dikenal dengan istilah *demand for labour* yang menggambarkan sebuah keadaan di mana tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menjadi peluang untuk diisi oleh pencari kerja atau dengan kata lain kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah dari lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik lapangan kerja yang sudah terisi maupun yang masih kosong. Demand for labour atau permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan berapa jumlah maksimum tenaga kerja yang dibutuhkan pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Lilimantik, 2016).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja adalah (Arifin & Firmansyah, 2017) :

1. Jumlah penduduk. Tingginya jumlah penduduk akan membuat tenaga kerja dan angkatan kerja akan mengalami peningkatan sehingga hal ini akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja.
2. Perkembangan ekonomi. Semakin pesat perkembangan ekonomi pada suatu daerah maka akan membuat berkembangnya aktivitas produksi. Tingginya aktivitas produksi akan membuat perusahaan menambah tenaga kerja baru.

Teori Neoklasik

Upah minimum dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang negatif. Menurut teori dari neoklasik, upah minimum yang ditetapkan diatas tingkat ekuilibrium akan membuat penawaran tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja sehingga hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran yang berdampak pada semakin hilangnya kesempatan kerja (Mankiw, 2015). Menurut Lipsey, Richard G ; Steiner (1985), akibat dari adanya penetapan upah minimum diatas ekuilibrium adalah :

1. Akan menaikkan tingkat upah orang yang masih tetap bekerja dalam industri tersebut.
2. Upah akan menurunkan jumlah kesempatan kerja yang sebenarnya dalam industri tersebut.
3. Terdapat kelebihan tenaga kerja yang ingin bekerja namun tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam industri.
4. Memberikan insentif pada sebagian pekerja untuk menghapuskan upah yang ditetapkan dengan menawarkan diri untuk bekerja dengan upah yang lebih rendah dari tingkat yang ditetapkan oleh serikat buruh.

Teori Wage Rigidity

Teori *wage rigidity* (model upah kaku) menjelaskan bagaimana hubungan antara upah minimum dan kesempatan kerja. Teori ini menjelaskan bahwa fenomena kekakuan upah disebabkan karena gagalnya pemerintah dalam menyesuaikan upah ke tingkat dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Ketika upah riil berada di atas ekuilibrium, penawaran tenaga kerja akan melebihi jumlah yang diminta oleh perusahaan sehingga akan muncul pengangguran. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan ketika terjadi kekakuan upah riil maka kesempatan kerja akan mengalami penurunan. Terdapat 3 penyebab kekakuan upah yaitu : undang-undang upah minimum, kekuatan monopoli serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2009).

Teori Two Sector Model

Teori *two sector model* menjelaskan bahwa upah minimum yang diberlakukan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ekuilibrium akan membuat perpindahan tenaga kerja dari sektor tertutup (formal) ke sektor tidak

tertutup (informal). Hal ini dikarenakan pemberlakuan upah minimum akan membuat sektor tertutup (sektor yang memberlakukan upah minimum) harus mengurangi tenaga kerja untuk menutup biaya produksi yang tinggi. Sehingga, kelebihan akan tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor yang tidak memberlakukan upah minimum (Sukatrilaksana, 2003). Menurut Packard (2001), di negara berkembang seperti Indonesia teori model dua sektor ini akan lebih relevan karena hanya sebagian kecil pekerja yang menjual jasa pada sektor formal. Dan sisanya banyak pekerja yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, dalam model ini juga dijelaskan mengenai hubungan antara industri dan kesempatan kerja. Teori Model dua sektor Lewis menyatakan jika terjadi peningkatan output dan investasi di sektor modern maka akan terjadi mobilisasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern (Todaro, M., P & Stephen, C., 2012). Hal ini dapat diartikan jika pertumbuhan sektor industri modern akan berkontribusi positif terhadap perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini, Lewis mengasumsikan jika perpindahan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja di sektor modern proposional dengan tingkat akumulasi modal di sektor modern. Sehingga, dengan cepatnya akumulasi kapital di sektor modern akan mendorong pertumbuhan sektor tersebut sehingga akan meningkatkan lapangan pekerjaan baru (Kuncoro, 2010).

Teori Schumpeter

Teori *schumpeter* menjelaskan bagaimana hubungan jumlah industri dan kesempatan kerja. Menurut Schumpeter, faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah inovasi dan pengusaha. Inovasi akan menimbulkan proses imitasi yang akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru (Saparila Worokinasih at.al, 2021). Pertumbuhan usaha-usaha baru akan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja.

Teori pole of growth

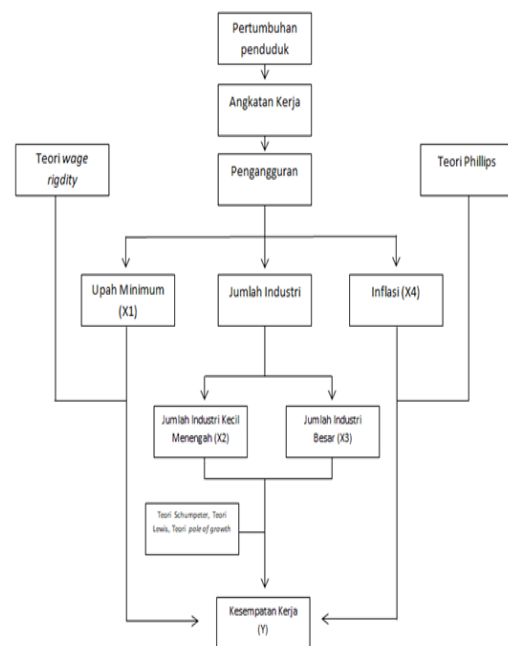
Teori *pole of growth* (pusat pertumbuhan) menjelaskan bagaimana hubungan antara industri dan kesempatan kerja. dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan terdapat industri penggerak di suatu

daerah yang akan mempengaruhi perkembangan industri di daerah – daerah lain. Pertumbuhan industri ini akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan masyarakat (Andita & Soesatyo, 2014).

Teori Kurva Phillips

Inflasi dan kesempatan kerja memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam kurva *Phillips* dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka pengangguran akan semakin berkurang. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan adanya kenaikan permintaan, maka harga akan mengalami kenaikan sehingga produsen akan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah tenaga kerja (Mankiw, 2006). Peningkatan permintaan tenaga kerja akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja yang ada di masyarakat. Dalam kurva Philip, stabilitas harga dan kesempatan kerja tidak mungkin berjalan secara bersamaan. Sehingga jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi maka pemerintah harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian
 Sumber : Data diolah Peneliti

Pengembangan Hipotesis

Penelitian dari Kawaguchi & Mori (2021) menemukan jika upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Kemudian penelitian dari Wahyunia, F.E., Riyantob, W. H., & Sulistyono (2021) menemukan jika jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Penelitian dari Puspita & Sudibia (2018) menemukan jika inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota/Kabupaten Jawa Barat 2017-2021.
- H2 : Jumlah Industri Kecil Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota/Kabupaten Jawa Barat 2017-2021.
- H3 : Jumlah Industri Besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota/kabupaten Jawa barat 2017-2021.
- H4 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota/Kabupaten Jawa Barat 2017-2021.

METODE

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel terdiri dari gabungan antara data *cross section* dan *time series* yang diambil pada periode waktu dengan objek yang sama. Data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sedangkan data *time series* yang digunakan adalah sampel pada tahun 2017–2021 untuk masing-masing wilayah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesempatan kerja di Jawa Barat yang diperoleh dari data jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah upah minimum, jumlah industri kecil menengah, jumlah industri besar, dan inflasi. Upah minimum diperoleh dari data upah minimum per Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sedangkan inflasi diperoleh dari PDB deflator yaitu presentase antara PDB nominal terhadap PDB riil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Untuk model regresi data panel diformulasikan sebagai berikut :

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1UMK_{it} + \beta_2JIKM_{it} + \beta_3JIB_{it} + \beta_4INF_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- KK = Kesempatan Kerja
- UMK = Upah Minimum Kota
- JIMK = Jumlah Industri Kecil Menengah
- JIB = Jumlah Industri Besar
- INF = Inflasi
- α = koefisien intersep
- β = Koefisien slope
- ϵ_{it} = Error

Dalam regresi data panel terdapat 3 model yang dapat digunakan yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk memilih model terbaik diantara ketiga model maka dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Namun, berdasarkan dengan tujuan penelitian penentuan model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect model*. Hal ini dikarenakan dalam *model fixed effect* dikombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan memperhatikan perbedaan antar individu. Dalam model *fixed effect*, perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Untuk memilih model terbaik antara CEM, FEM, dan REM, dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* dan hasil ringkasnya ditunjukkan pada tabel 2, berikut :

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	Nilai probabilitas (0.0000)	FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)
Uji Hausman	Nilai probabilitas (0.0106)	FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)
Uji Lagrange Multiplier	Tidak dilakukan	-

Sumber : Hasil Analisis.data diolah

Tabel 2 menunjukkan hasil bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Pertama, dilakukan uji Chow untuk

memilih model terbaik antara FEM dan CEM didapatkan hasil probabilitas (*p-value*) $0.0000 < 0.05$, sehingga model FEM adalah terbaik. Setelah itu, dilakukan kembali uji spesifikasi untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM yaitu dengan menggunakan uji Hausman didapatkan hasil probabilitas (*p-value*) $0.0106 < 0.05$ sehingga model FEM adalah yang terbaik. Hasil dari pemilihan model ini sesuai dengan asumsi awal penelitian jika model yang terpilih berdasarkan tujuan penelitian adalah *Fixed Effect Model*. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik meliputi : multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedesitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

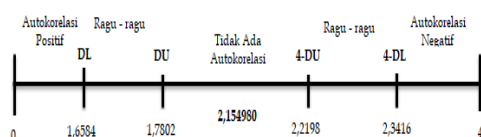
	Log X1	Log X2	X3	X4
Log UMK (X1)	1.0000	0,3706	0,5813	-,0.2953
Log JIKM (X2)	0,3706	1.0000	0,4546	-0,1668
JIB (X3)	0,5813	0,4546	1.0000	-0,0994
INF (X4)	-0,2953	-0,1668	-0,0994	1.0000

Sumber : Hasil Analisis, Data diolah

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat bagaimana korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2011), untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat menggunakan cara yaitu menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika nilai antar variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas. Dalam penelitian ini didapat nilai korelasi antar variabel bebas $< 0,8$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Gambar 4. Grafik Uji Durbin Watson



Sumber : Hasil Analisis, Data diolah

Uji autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi dari residual antar waktu dan antar ruang. Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *Durbin Watson* (*dw*). Jika nilai $dU < dw < 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini nilai Durbin Watson adalah 2,154980 di mana nilai ini lebih besar dari *dU* yaitu 1,7802 dan lebih kecil dari $4-dU$ sebesar 2,2198 sehingga dapat disimpulkan jika tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedasitas

Tabel 4 menunjukkan hasil uji glejser.

Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas
Log UMK	-25570.92	-1.099443	0.2741
Log JIKM	-125135.6	-1.961864	0.0525
JIB	340.1506	1.814556	0.0725
INF	-1069.581	-0.570305	0.5697

Sumber : Hasil Analisis, Data diolah

Menurut (Ghozali, 2011), uji heterokedasitas merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada atau tidak adanya heterokedasitas bisa dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai residual absolut. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari signifikansi yang digunakan yaitu 5% berarti tidak terjadi heterokedasitas. Berdasarkan tabel 4, nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedasitas.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Upah Minimum (UMK)	147505.4	0.0024
Jumlah Industri Kecil Menengah (JIKM)	272655.9	0.0388
Jumlah Industri Besar (JIB)	1598.390	0.0001
Inflasi (INF)	1272.191	0.7404
Konstanta	-4257117	0.0003
Observasi	135	
Probabilitas F	0.000000	
Adjusted R-squared	0.996285	

Sumber : Hasil Analisis, Data diolah

$$KK = -4257117 + 147505.4 \text{ UMK} + 272655.9 \text{ JIKM} + 1598.390 \text{ JIB} + 1272.191 \text{ INF} + \varepsilon$$

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil regresi diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.996285. Sehingga dapat dikatakan jika variasi Kesempatan kerja di Jawa Barat 99,62% dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum, jumlah industri kecil menengah, jumlah industri besar, dan inflasi. Sisanya sebesar 0,38% dapat dijelaskan oleh variabel di luar model.

b. Uji F

Dalam penelitian ini didapatkan hasil probabilitas F sebesar $0.000000 < 0.05$ yang artinya secara simultan variabel upah minimum, jumlah industri kecil menengah, jumlah industri besar, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat.

c. Uji t

1. Variabel upah minimum memiliki nilai probabilitas t sebesar $0.0024 < 0.05$ yang artinya variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Kemudian nilai koefisien UMK adalah 147505.4 artinya peningkatan upah minimum sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap sama akan menaikkan rata-rata kesempatan kerja sebesar 147505 tenaga kerja.
2. Variabel jumlah industri kecil menengah memiliki nilai probabilitas t sebesar $0.0388 < 0.05$ yang artinya variabel jumlah industri kecil menengah memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Kemudian nilai koefisien JIKM adalah 272655.9 artinya peningkatan jumlah industri kecil menengah sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap sama akan menaikkan rata-rata kesempatan kerja sebesar 272656 tenaga kerja.
3. Variabel jumlah industri besar memiliki nilai probabilitas t sebesar $0.0001 < 0.05$ yang artinya variabel jumlah industri besar memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Kemudian nilai koefisien JIB adalah 1598.390 artinya peningkatan jumlah industri besar sebesar 1 unit dengan asumsi variabel lain tetap sama akan meningkatkan rata-rata kesempatan kerja sebesar 1598 tenaga kerja.

Berdasarkan hasil regresi di atas, didapatkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

4. Variabel inflasi memiliki nilai probabilitas t sebesar $0.7404 > 0.05$ yang artinya variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja.

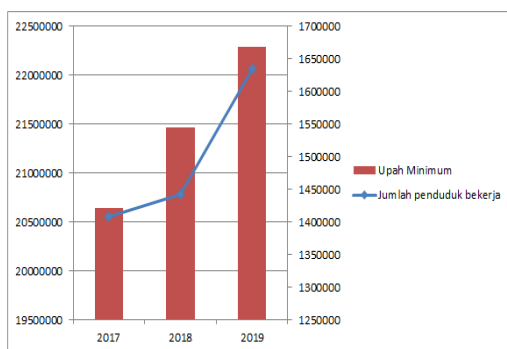
Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja

Upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini berarti kenaikan upah minimum akan membuat kenaikan pada kesempatan kerja. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori neoklasik yang menyatakan jika kenaikan upah minimum di atas ekuilibrium akan membuat hilangnya kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan ketika upah minimum naik maka penawaran tenaga kerja akan lebih besar dibandingkan dengan permintaannya sehingga akan banyak tenaga kerja yang menganggur (Mankiw, 2015). Selain itu terdapat teori wage rigidity yang menyatakan jika adanya upah minimum menyebabkan kekakuan upah sehingga produsen tidak dapat menetapkan upah minimum di bawah upah kaku. Akibatnya, produsen harus mengurangi pekerja yang diminta sehingga kesempatan kerja semakin rendah (Mankiw, 2009). Terdapat beberapa penelitian yang memiliki hasil jika upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Penelitian dari Fauzani (2019) menemukan jika kenaikan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di provinsi Jambi. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Kawaguchi & Mori (2021) yang menemukan jika kenaikan upah minimum yang terjadi karena adanya kebijakan revisi upah minimum di Jepang tahun 2007 memberikan dampak terhadap menurunnya lapangan pekerjaan wanita dan pria dengan usia produktif.

Menurut teori two sector model, Upah minimum yang diberlakukan lebih tinggi dibandingkan dengan upah ekuilibrium akan membuat perpindahan pekerja dari sektor yang memberlakukan upah minimum ke sektor yang tidak memberlakukan upah minimum. Hal ini dikarenakan pemberlakuan upah minimum akan membuat sektor tertutup (sektor yang

memberlakukan upah minimum) harus mengu-rangi tenaga kerja untuk menutup biaya pro-duksi yang tinggi. Sehingga, kelebihan akan tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor yang tidak memberlakukan upah minimum (Suka-trilaksana, 2003). Menurut Packard (2001), di negara berkembang seperti Indonesia teori model dua sektor ini akan lebih relevan karena hanya sebagian kecil pekerja yang menjual jasa pada sektor formal (sektor yang diatur dan tunduk pada upah minimum). Dan sisanya banyak pekerja yang bekerja di sektor informal (sektor yang tidak diatur, dan upah ditentukan oleh pasar).

Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 90B ayat (1) disebutkan jika ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha Mikro dan Kecil. Dalam hal ini upah pada industri kecil mikro ditetapkan berdasarkan kesepa-katan antara pekerja dan pengusaha. Sehingga kenaikan upah minimum tidak memberikan efek terhadap kesempatan kerja di industri kecil mikro. Jika dikaitkan dengan teori two sector model, kenaikan upah minimum di Jawa Barat memang akan menurunkan kesempatan kerja bagi industri yang menerapkan upah minimum yang dalam hal ini adalah industri menengah dan industri besar. Namun, kelebih-an tenaga kerja yang tidak tertampung di industri menengah dan besar dapat ditampung oleh industri kecil dan mikro. Sehingga dapat disimpulkan jika kenaikan upah minimum di Jawa Barat dapat meningkatkan kesempatan kerja.



Gambar 5. Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Bekerja di Jawa Barat tahun 2017-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

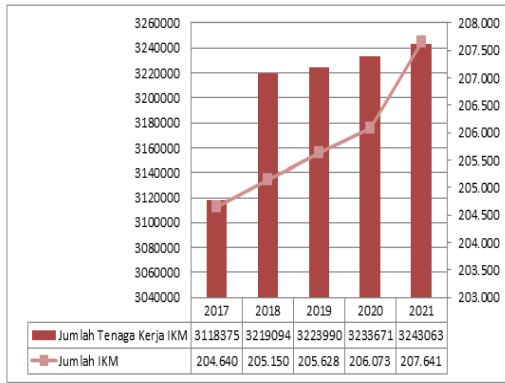
Upah minimum di Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019. Namun, kenaikan upah minimum di Jawa Barat juga diikuti oleh kenaikan tenaga kerja yang bekerja di Jawa Barat. Hal ini membuktikan jika kenaikan upah minimum di Jawa Barat membuat kenaikan pada kesempatan kerja. Kenaikan upah minimum yang diikuti oleh kenaikan kesempatan kerja di Jawa Barat diduga disebabkan karena kenaikan upah minimum yang ada di Jawa Barat masih berada di bawah ekuilibrium pasar sehingga kenaikan upah minimum tidak menyebabkan penurunan terhadap kesempatan kerja yang ada di Jawa Barat.

Selain itu, upah minimum yang ditetapkan di Jawa Barat telah didasarkan pada kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum yang ditetapkan di Jawa Barat sudah dapat mencukupi kebutuhan para pekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran di Jawa Barat tidak pilih-pilih dalam mencari pekerjaan sehingga pengangguran di Jawa Barat dapat berkurang. Namun, jika upah yang diberikan turun maka pekerja akan mencari pekerjaan baru dengan upah yang mereka inginkan. Namun, dalam proses mencari pekerjaan baru tersebut terjadi persaingan yang sangat ketat. Hal ini menyebabkan banyak pekerja menganggur. Sehingga, kenaikan upah minimum memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.

Pengaruh Jumlah Industri Kecil Menengah terhadap Kesempatan Kerja

Jumlah Industri Kecil Menengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan teori dari Schumpeter dimana faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah inovasi dan pengusaha. Inovasi akan menimbulkan proses imitasi yang akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru (Saparila Worokinasih at.al, 2021). Pertumbuhan usaha-usaha baru akan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini juga didukung penelitian dari Wahyunia, F.E., Riyantob, W. H., & Sulistyono (2021) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan jumlah industri terhadap kesempatan kerja di provinsi Jawa Timur Tahun 1995–2020 yang

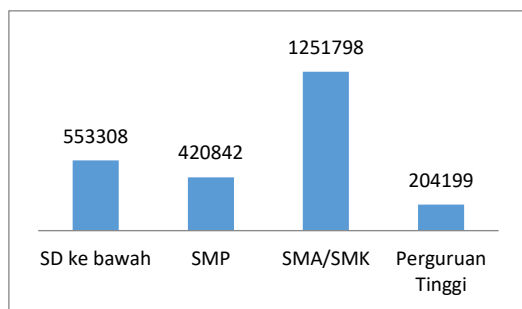
menemukan jika jumlah industri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Puspita & Sudibia (2018) yang menemukan jika jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja dalam sektor industri di Banten.



Gambar 6. Jumlah IKM dan Tenaga Kerja IKM 2017-2021

Sumber : Open Data Jabar (2021)

Gambar 6 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah industri kecil menengah yang ada di Jawa Barat diikuti oleh kenaikan tenaga kerja yang bekerja di industri kecil menengah. Hal ini membuktikan industri kecil menengah signifikan dalam mempengaruhi kesempatan kerja yang ada di Jawa Barat.



Gambar 7. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Jawa Barat 2021

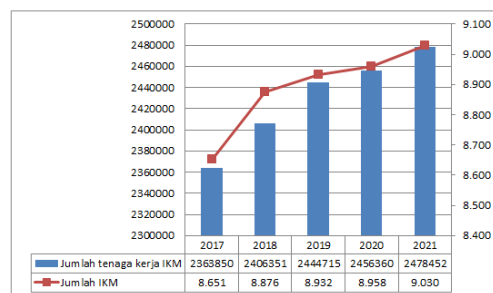
Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Selain itu, pengangguran terbuka di Jawa Barat banyak didominasi oleh lulusan SMA dan SMK yaitu sebesar 1.251.798 tenaga kerja. Banyaknya pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMA/SMK membuktikan jika pengangguran di Jawa Barat masih banyak terjadi pada angkatan kerja dengan keahlian rendah. Sehingga, industri kecil menengah

merupakan suatu wadah yang sangat tepat untuk menampung tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pengaruh Jumlah Industri Besar terhadap Kesempatan Kerja

Jumlah industri besar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini sesuai dengan teori pusat pertumbuhan atau *pole of growth* di mana setiap proses pembangunan terdapat industri penggerak di suatu daerah yang akan mempengaruhi perkembangan industri di daerah-daerah lain. Pertumbuhan industri ini akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan masyarakat (Andita & Soesatyo, 2014). Lalu terdapat teori dari Lewis yang menyatakan jika terjadi peningkatan output dan investasi di sektor modern maka akan terjadi mobilisasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern (Todaro, M., P & Stephen, C., 2012). Hal ini dapat diartikan jika pertumbuhan sektor industri modern akan berkontribusi positif terhadap perluasan kesempatan kerja. Hal ini juga didukung penelitian dari Wahyunia, F.E., Riyantob, W. H., & Sulistyono (2021) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan jumlah industri terhadap kesempatan kerja di provinsi Jawa Timur Tahun 1995–2020 yang menemukan jika jumlah industri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur. Lalu terdapat penelitian dari Andita & Soesatyo (2014) yang menemukan jika industri formal memiliki peran dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Ponorogo dengan rata-rata penyerapan sebesar 36,96%.



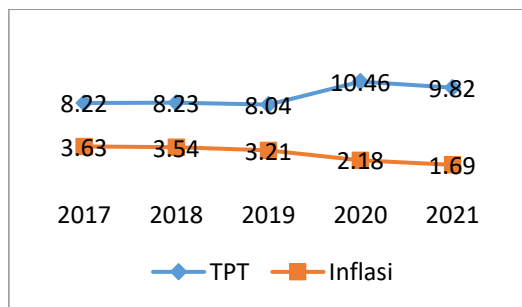
Gambar 8. Jumlah Industri Besar dan Tenaga Kerja di Industri Besar 2017-2021

Sumber : Open Data Jabar (2021)

Jika dilihat, Pertumbuhan jumlah industri besar diikuti dengan kenaikan tenaga kerja yang bekerja di industri besar. Hal ini menjadi

Pengaruh Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Phillip yang menyatakan dalam jangka pendek terdapat hubungan trade off antara inflasi dan pengangguran, di mana jika inflasi mengalami kenaikan maka pengangguran akan menurun sehingga kesempatan kerja akan mengalami meningkat (Mankiw, 2006). Hal ini dikarenakan jika pemerintah ingin mengatasi permasalahan pengangguran yang tinggi sebagai akibatnya pemerintah harus dapat menanggung beban inflasi yang tinggi karena inflasi pada model ini diasumsikan sebagai cerminan kenaikan permintaan agregat (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Terdapat penelitian serupa yang menunjukkan jika inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja, yaitu penelitian dari (Nurhardiansyah et al., 2017). Dalam penelitian tersebut dijelaskan jika kenaikan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja yang ada di pulau Jawa.



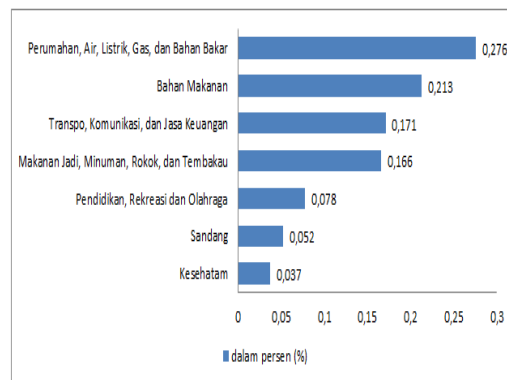
Gambar 9. Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat 2017-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021).Data diolah

Gambar 9 menunjukkan bahwa inflasi di Jawa Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, TPT di Jawa Barat berfluktuatif. Jika dilihat, penurunan inflasi di Jawa Barat tidak membuat tingkat pengangguran di Jawa Barat mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, Penurunan inflasi dari 3,54% menjadi 3,21%

bukti jika jumlah industri besar di Jawa Barat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja.

tidak diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran di Jawa Barat. TPT di Jawa Barat pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 8,04%. Bukan hanya itu, pada tahun 2021, terjadi penurunan inflasi dari 2,18% menjadi 1,69% namun tidak diikuti dengan peningkatan pengangguran. TPT di Jawa Barat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 10,46% menjadi 9,82%. Salah satu alasan inflasi tidak signifikan dalam mempengaruhi kesempatan kerja karena inflasi di Jawa Barat tidak disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat. Kenaikan inflasi di Jawa Barat disebabkan kenaikan dari sisi *supply*.



Gambar 10. Kontribusi Kelompok Komoditas Terhadap Nilai Inflasi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Sumber : Open Data Jabar (2019)

Dapat dilihat pada Gambar 10, Sepanjang periode 2017-2019, komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Di mana komponen tersebut termasuk dalam komponen bahan baku untuk industri. Kenaikan bahan baku industri akan menyebabkan produsen mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga kesempatan kerja akan berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum, jumlah industri, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2017-2021. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah

pertama, peningkatan upah minimum di Jawa Barat dapat meningkatkan kesempatan kerja yang ada di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan upah minimum yang diikuti oleh peningkatan dari jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat. Selain itu, upah di Jawa Barat sudah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi sehingga upah minimum di Jawa Barat sudah dirasa cukup dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jawa Barat. Kedua, kenaikan jumlah industri kecil menengah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Barat dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah industri kecil menengah yang diikuti oleh kenaikan tenaga kerja yang bekerja di industri kecil menengah di Jawa barat. Ketiga, kenaikan jumlah industri besar dapat meningkatkan kesempatan kerja yang ada di Jawa Barat dibuktikan dengan kenaikan tenaga kerja yang terserap dalam industri besar di Jawa barat. Keempat, inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja disebabkan inflasi yang terjadi di Jawa Barat bukan berasal dari sisi permintaan agregat melainkan dari sisi supply.

Saran

Saran kebijakan berdasarkan pada hasil penelitian adalah : Pertama, pemerintah harus terus mendorong pertumbuhan industri kecil menengah dengan memberikan berbagai insentif seperti kredit permodalan agar lebih banyak industri kecil menengah yang berkembang dan pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja. Selain itu, perlu lebih dikembangkannya pelatihan kewirausahaan bagi industri kecil dan menengah agar mereka dapat melihat peluang usaha dan pasar baru. Sehingga pertumbuhan industri kecil menengah dapat meningkat dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kedua, pemerintah harus lebih mengembangkan industri pada karya dibandingkan dengan industri padat modal agar lebih banyak tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

Adisetiawan, R. (2018). Kausalitas Ekonomi Makro Dan Global Terhadap Pasar Modal Indonesia. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 2(1), 66. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.32>

- Andita & Soesatyo. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Melalui Industri Formal Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v2n3.p%25p>
- Arifin, S., & Firmansyah, F. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v7i2.4978>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Barat Sensus Ekonomi 2016*.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Jawa Barat Dalam Angka 2017. jabar.bps.go.id/publication/2017/08/12/62379e17bcc20052a7991d35/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2017.html
- Badan Pusat Statistik. (2018). Jawa Barat Dalam Angka 2018. <https://jabar.bps.go.id/publication/2018/08/16/d8b96de222796402938666e4/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Jawa Barat Dalam Angka 2019. <https://jabar.bps.go.id/publication/2019/08/16/b0a6b953b76cbe2239dc912d/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Jawa Barat Dalam Angka 2020. <https://jabar.bps.go.id/publication/2020/04/27/cfab9a400cf304f800182a5f/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jawa Barat Dalam Angka 2021. <https://jabar.bps.go.id/publication/2021/02/26/4d3f7ec6c519dda0b9785d45/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Inflasi Tahunan Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/statictable/2022/07/08/636/inflasi-tahunan-di-provinsi-jawa-barat-2018-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Angkatan Kerja per Provinsi di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di Indonesia. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/543/websi%te_6/1

- Badan Pusat Statistik. (2021d). Upah Minimum Regional/Propinsi 2017-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/19/220/1/upah-minimum-regional-propinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (n.d.). [SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) per Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Juta Rupiah), 2017-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/171/2194/1/seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-100-menurut-pengeluaran-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (n.d.). [SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) per Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Juta Rupiah), 2017-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/171/2193/1/seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2021). Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/243/1/penduduk-menurut-kelompok-umur.html>
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia. APBN Induk, 23–31.
- Dwi, B., & Djohan, D. S. (2015). *Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Samarinda* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v12i1.18>
- Fauzani, E. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.56>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagalung, P. S., & Santosa, P. B. Santosa, P. B. (2013). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah (35 Kab/Kota). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 1–12. <http://ejournal-s1.un-dip.ac.id/index.php/jme>
- Kawaguchi, D., & Mori, Y. (2021). Estimating the effects of the minimum wage using the introduction of indexation. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 184, 388–408. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.01.032>
- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. (n.d.). Jumlah Industri Kecil Menengah dan Industri Besar per Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017 - 2021.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Daftar Kawasan Industri di Indonesia. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pencari-kerja-terdaftar-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar - dasar Ekonomika Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lilimantik, E. (2016). *Buku Ajar Ekonomi Sumberdaya Manusia* (1th ed.). Fakultas Perikanan dan Kelautan UNLAM.
- Lipsey, Richard G; Steiner, P. O. (1985). *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*. Bina AKSara.
- Mankiw, N. G. (2006). *Macroeconomics* (6th ed.). Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2009). *Macroeconomics*. Worth, New York.
- Mankiw, N. G. (2015). *Principles of Macroeconomics* (7th ed.). Cengage Learning. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5_42
- Nurhardiansyah, A., Istiyani, N., & Prianto, F. W. (2017). *Pengaruh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015*. *Ekuilibrum*, 2(2), 56–61. <https://jurnal-unej.ac.id/index.php/JEK/article/download/13890/7255>
- Packard, T. G. (2001). Is There A Positive Incentive Effect from Privatizing Social Security? *Evidence from Latin America**. 1–27.
- Puspita, N. P. R., & Sudibia, I. K. (2018). *Analisis Determinan Kesempatan Kerja Dalam Sektor Industri Di Provinsi Banten*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 265–283. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/51492/30505>

- Rakhmawati, A., & Boedirochminarni, A. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 74–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v2i1.6968>
- Saparila Worokinasih at.al. (2021). *Youth Entrepreneur* (1th ed.). Media Nusa Creative.
- Sukatrilaksana, L. (2003). The Effect of Minimum Wages on Employment in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5(3), 74–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v5i3.314>
- Todaro, M., P & Stephen, C., S. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020. (n.d.).
- Wahyunia, F.E., Riyantob, W. H., & Sulistyono, S. W. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(No. 3), 551–562. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18729>
- Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 1–8.